

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, pemilu perlu diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Partisipasi rakyat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara menjadi bagian dari instrument pemilu.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. (Jimly Asshiddiqie, 2013: 1)

Eksperimentasi demokrasi lewat reformasi system dan prosedur teknis pemilu, tidak akan punya makna terhadap perbaikan kualitas demokrasi jika tidak diikuti oleh peningkatan pemahaman dan kesadaran politik rakyat untuk terus mengawasi kinerja berbagai lembaga demokrasi. Pada saat yang sama, system pemilu baru di bentuk dalam situasi masyarakat pemilih yang sudah terdidik dan mampu memahami system dan prosedur teknis pemilu yang semakin kompleks, akan membuat rakyat memiliki akses dan kontrol terhadap pelaksanaan pemilu.

Seiring terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman politik rakyat, ketidakpuasan terhadap kelemahan sistem pemilu semakin mencuat. Hal ini disebabkan pelaksanaan para aparat pelaksana pemilu di Indonesia tidak

berdasarkan pada semangat kejujuran dan keadilan. Persoalan terbesar adalah adanya kerengganagan (jarak) antara wakil terpilih dengan rakyat pemilih di daerah pemilihan masing-masing.

Sejatinya, Pemilu tidak semata-mata diklaim sebagai agenda pesta rakyat, konotasi berpesta akan diperhadapkan dengan agenda hura-hura, dan tidak ada substansi nilai dalam pengejawantahan nilai demokrasi. Layaknyanya Pemilu adalah bagian dari implementasi daulat rakyat yang dilaksanakan selama lima tahun untuk menentukan kuasa yang didaulatkan oleh rakyat. Dengan demikian, Pemilu merupakan bagian dari narasi demokrasi yang dijalankan oleh Negara sebagai bagian dari proses kedaulatan warga bangsa. Realitas menunjukkan, ketidakpuasan masyarakat pasca Pemilu merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Sebahagian besar anggota DPRD mengingkari janji politik serta kebiasaan pola perilaku yang jauh berbeda dengan masa kampanye politik.

Upaya untuk mengubah jarak antara wakil terpilih dengan rakyat dilakukan oleh parah calon legislative dari berbagai partai politik dengan berupaya menarik simpati dari rakyat. Pendekatan dilakukan oleh para calon, mulai dari kampanye terbuka, pendekatan secara personal, bahkan ada yang menggunakan politik uang sebagai alat untuk membeli suara. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para calon legislatif sebagai upaya untuk mewujudkan harapan agar lolos menjadi anggota dewan dan dalam lingkup yang lebih luas sebagai upaya untuk memenangkan partainya dalam pemilu legislative tahun 2019.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para calon legislatif dalam pelaksanaannya ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Penegeluaran biaya yang sangat besar dari para calon legislatif tidak menjamin bahwa dirinya akan terpilih dalam pemilihan anggota legislatif. Hal ini

dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh para calon yang kurang efektif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga tidak bisa menarik simpati pemilih.

Dalam skala tertentu, bisa disikapi bahwa masyarakat pemilih lebih kritis terhadap hazatan demokrasi di tingkat lokal. Seringkali para calon anggota legislative diperhadapkan dengan sikap pragmatisme masyarakat pemilih, diantaranya “*jab bo megaya doi paralu*” merupakan bagian dari sikap politik pemilih yang tidak percaya terhadap janji-janji politik pada setiap pemilu. Hal ini menunjukkan masyarakat pemilih memutuhkan hal-hal instan dalam setiap perhelatan politik terutama dalam memilih wakil rakyat pada setiap Pemilu. Kondisi seperti ini juga berlaku pada saat Pemilu 2019 dalam memilih anggota DPRD baik ditingkat Provinsi maupun anggota calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

Peta politik Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019 mengalami perubahan signifikan. Sejak Pemilu sebelumnya, Partai PDIP hanya memiliki 3 (tiga) Kursi, yakni Dapil 1 Tilamuta, Botumoito, Manunggu 1 Kursi; Dapil 2 (dua) Dulupi, Wonosari 2 (dua) kursi dan Dapil 3 Paguyaman, Paguyaman Pantai tidak memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Boalemo. Sementara partai pemenang pada Pemilu sebelumnya adalah partai Golkar. Namun demikian, pada Pemilu 2019 PDIP sebagai partai pemenang dengan jumlah 7 Kursi dengan alokasi Dapil 1 sebanyak 2 (dua) kursi; Dapil 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) kursi dan Dapil 3 (tiga) 2 Kursi. Data tersebut menunjukkan hamper semua Dapil ada ketambahan 1 (satu) kursi dan khusus untuk Dapil 3 (tiga) memperoleh 2 (dua) Kursi. Hal yang sama berlaku juga pada pemilihan anggota DPRD Provinsi yang salama ini hanya 1 (satu) kursi menjadi 2 (dua) Kursi di Kabupaten Boalemo.

Data di atas menunjukkan strategi partai politik PDIP menjelang Pemilu 2019 sangat efektif dalam pemenangan partai politik di Kabupaten Boalemo. Khusus untuk Dapil 2 (dua) Dulupi-Wonosari PDIP mendapatkan ketambahan 1 (satu) kursi dan menjadi 3 (tiga) kursi yang

sebelum Pemilu 2019 mendapatkan 2 (dua) kursi. Sesuai dengan data observasi awal menunjukkan ada beberapa strategi politik yang dilakukan oleh PDIP di Dapil 2 (dua) Dulupi dan Wonosari. *Pertama*, strategi melalui mobilisasi birokrasi, sebagai kader Partai PDIP Bupati Darwis Moridu telah berhasil mengantarkan istrinya Rensi Makuta sebagai Anggota DPRD kabupaten Boalemo, hal ini pun berlaku di Dapil I (satu) Wahyu Moridu sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo. *Kedua*, Kandidat, strategi promosi kandidat sangat efektif dalam mendulang suara di Dapil II Dulupi- Wonosari, hal ini dibuktikan dengan selainpethana, PDIP ada ketambahan 1 kursi di Dapil 2. Hal yang sama terjadi di Dapil III PDIP mendapat 2 (kursi) sebagai perwakilan dari Dapil Paguyaman dan Paguyaman Pantai.

*Ketiga*, program Kerja, selain kandidat calon, program kerja sangat efektif sebagai bagian dari strategi politik PDIP di Kecamatan Dulupi. Salah satu program kerja calon dan partai yang dinilai sangat efektif adalah kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditanggulangi oleh Bupati Darwis Moridu beserta PDIP Kabupaten Boalemo. *Keempat* jejaring sosial, strategi ini dianggap efektif dan sebagai faktor pendorong atas kemenangan PDIP di Kecamatan Dulupi. Mulai dari tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat antusias dalam memenangkan PDIP di Dapil II khususnya Kecamatan Dulupi. Kemenangan 3 (tiga) orang anggota Legislatif di Kabupaten Boalemo disokong penuh oleh modal sosial melalui jejaring sosial di masyarakat kecamatan Dulupi.

Dengan demikian kemenangan partai PDIP dalam pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo khususnya di Kecamatan Dulupi tidak terlepas dari strategi yang dibuat oleh partai tersebut. Strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam upaya kemenangan legislatif tahun 2019 dilakukan secara kelembagaan, yaitu strategi partai dalam memenangkan pemilu maupun strategi yang dilakukan secara personal oleh para calon legislative. Strategi merupakan bagian yang sangat

penting dalam memenangkan pemilu. Terkait dengan hal itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang strategi yang dilakukan oleh partai PDIP dengan judul **“Stratgi Partai PDIP dalam Pemenangan Pemilu 2019 di Kecamatan Dulupi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana strategi politik PDIP dalam memenangkan pemilu legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Dulupi ?
- b. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi kemenangan PDIP di Kecamatan Dulupi pada Pemilu 2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi politik PDIP dalam memenangkan pemilu legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Dulupi.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi kemenangan PDIP di Kecamatan Dulupi pada Pemilu 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan akan membawa manfaat yang secara umum.

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini akan menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo yang akan menulis tugas akhir menyangkut dengan strategi pemenangan partai PDIP Di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

Bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengetahuan terbaru bagi peneliti dalam menulis menyangkut dengan strategi pemenangan partai PDIP.